

**AKIBAT HUKUM YANG TIMBUL KARENA TIDAK
DILAKUKANNYA PEMBERITAHUAN KEPADA MENTERI
OLEH DIREKSI BARU ATAS PENGANGKATAN DIRINYA
SENDIRI**

TESIS

**Teddy Anggoro
0806426111**



**UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
JAKARTA
DESEMBER, 2009**

**AKIBAT HUKUM YANG TIMBUL KARENA TIDAK
DILAKUKANNYA PEMBERITAHUAN KEPADA MENTERI
OLEH DIREKSI BARU ATAS PENGANGKATAN DIRINYA
SENDIRI**

TESIS

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum

**Teddy Anggoro
0806426111**



**UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
KEKHUSUSAN HUKUM EKONOMI
JAKARTA
DESEMBER, 2009**

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :
Nama : Teddy Anggoro
NPM : 0806426111
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Tesis : Akibat Hukum Yang Timbul Karena Tidak Dilakukannya
Pemberitahuan Kepada Menteri Oleh Direksi Baru Atas
Pengangkatan Dirinya Sendiri

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Pascasarjana, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing/Penguji : Dr. Freddy Harris, S.H., LL.M., ACCS. ()
Ketua Sidang/Penguji : Dr. Andri Gunawan Wibisana, S.H., LL.M. ()
Penguji : Kurnia Toha, S.H., LL.M., Ph.D. ()

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 6 Januari 2009

**AKIBAT HUKUM YANG TIMBUL KARENA TIDAK
DILAKUKANNYA PEMBERITAHUAN KEPADA
MENTERI OLEH DIREKSI BARU ATAS
PENGANGKATAN DIRINYA SENDIRI**

Teddy Anggoro

Universitas Indonesia

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

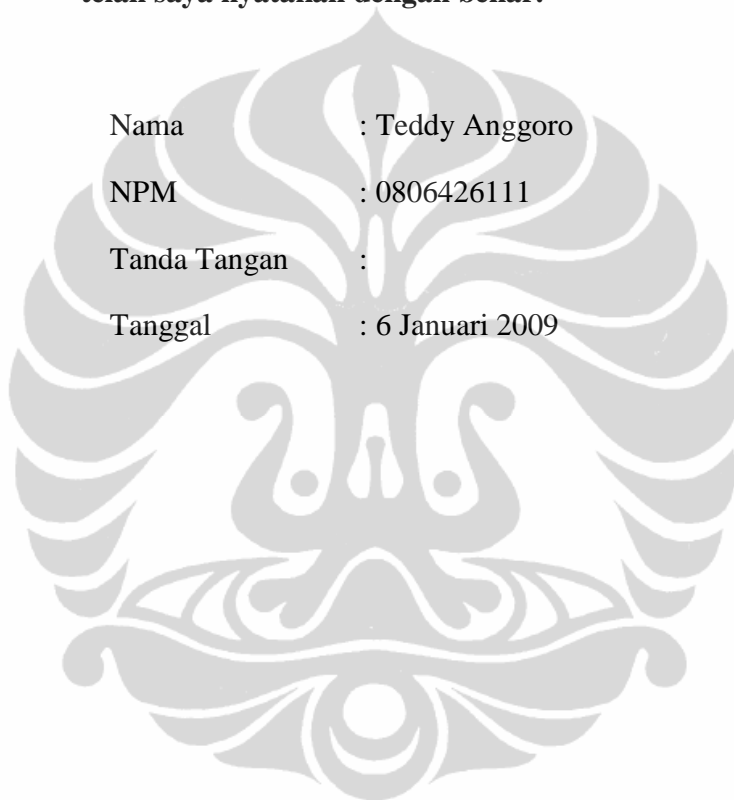
**Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.**

Nama : Teddy Anggoro

NPM : 0806426111

Tanda Tangan :

Tanggal : 6 Januari 2009



**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Teddy Anggoro

NPM : 0806426111

Program : Pascasarjana

Fakultas : Hukum

Jenis Karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

“Akibat Hukum Yang Timbul Karena Tidak Dilakukannya Pemberitahuan Kepada Menteri
Oleh Direksi Baru Atas Pengangkatan Dirinya Sendiri.”

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta

Pada Tanggal:

Yang menyatakan

Teddy Anggoro

ABSTRAK

Nama : Teddy Anggoro
Program : Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia
Judul : Akibat Hukum Yang Timbul Karena Tidak Dilakukannya Pemberitahuan Kepada Menteri Oleh Direksi Baru Atas Pengangkatan Dirinya Sendiri

Tesis ini membahas kewajiban direksi yang baru diangkat untuk melakukan pemberitahuan atas pengangkatan dirinya kepada Menteri Hukum dan HAM RI terlepas dari kewajiban pemberitahuan oleh direksi lama mengenai perubahan anggota direksi. Penelitian ini penting karena dalam praktek kewajiban tersebut sering tidak dilakukan oleh Notaris sebagai kuasa dari perusahaan untuk pengurusan administrasi badan hukum, dalam hal ini Pemberitahuan Perubahan Anggota Direksi. Dalam penelitian ini digunakan 2 (dua) metode penelitian yaitu studi pustaka dan studi empiris. Metode penelitian tersebut dipakai untuk menjawab permasalahan sebagai berikut; *pertama*, akibat hukum yang timbul karena tidak dilaksanakannya kewajiban pemberitahuan kepada Menteri atas pengangkatan dirinya dalam kaitannya dengan kewenangan melakukan pengurusan perseroan. *Kedua*, tanggung jawab hukum direksi baru atas seluruh perbuatan hukum sejak Undang-Undang Perseroan Terbatas berlaku, dalam kaitannya dengan hubungan perseroan dengan pihak ketiga yang berkepentingan. Dan *terakhir*, penyebab tidak efektifnya ketentuan Pasal 94 ayat (9) Undang-Undang Perseroan Terbatas dan menemukan solusinya, sehingga penulisan ini tidak hanya berguna dalam tataran pengembangan teoritis tetapi juga bermanfaat dalam bagi Pemerintah dalam melaksanakan tugas pengadminsitrasian badan hukum.

Kata kunci:

Pemberitahuan, perubahan anggota direksi, akibat hukum, tanggung jawab direksi

ABSTRACT

Name : Teddy Anggoro
Study Program : Master Program Faculty of Law University of Indonesia
Judul : Legal Consequences Arise Due To Unreported Act of Self-Appointed Director To The Ministry

This thesis discusses the obligation of new directors appointed to conduct the notification on the appointment of himself to the Minister of Justice and Human Rights obligations regardless of notification by the old directors of the board members change. This study is important because in practice this obligation is often not done by the notary as authorized by the company for the administrative management of legal entities, in this case the Board of Directors Members Change Notification. In this study used 2 (two) methods of research library and study the empirical study. The research methods used to answer the problems as follows: first, the legal consequences arising from the implementation of obligations not notice to the Minister on the appointment of himself in relation to the management company the authority to do. Second, the legal responsibility of the new directors of all legal actions since the Law of Limited Liability Company applies, in relation to corporate relationships with third parties concerned. And last, the cause of the ineffectiveness of the provisions of Article 94 paragraph (9) Law of Limited Liability Company and find a solution, so the writing is not only useful in the development of the theoretical level but also useful in the Government in implementing the administrative tasks of legal entity.

Kata kunci:

notification, board of directors change, legal consequences, directors liability

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL		
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS		
HALAMAN PENGESAHAN		
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH		
ABSTRAK		
ABSTRACT		
DAFTAR ISI		
BAB I	PENDAHULUAN	
A.	Latar Belakang.....	1
B.	Identifikasi Permasalahan.....	7
C.	Tujuan Penelitian.....	7
D.	Kerangka Teori.....	8
	1. Teori Badan Hukum.....	8
	2. Teori Tujuan Korporasi.....	10
	3. Teori Good Corporate Governance.....	10
E.	Metode Penelitian.....	11
F.	Sistematika Penulisan.....	12
BAB II	PERSEROAN TERBATAS SEBAGAI SUBYEK HUKUM	
A.	Perseroan Terbatas Sebagai Badan Hukum.....	14
B.	Perseroan Terbatas Sebagai <i>Separate Legal Personality</i>	17
C.	Pendirian Perseroan Terbatas.....	19
D.	Perubahan Anggaran Dasar	26
E.	Daftar Perseroan dan Pengumuman.....	29
BAB III	TANGGUNG JAWAB DIREKSI DALAM PENGURUSAN PERSEROAN	
A.	Hubungan Direksi Dengan Perseroan Terbatas	32

B.	Pengurusan Perseroan Oleh Direksi	35
C.	Tanggung Jawab Direksi	37
D.	Pengangkatan, Penggantian dan Pemberhentian Direksi	41
E.	<i>Fiduciary Duty</i> dan <i>Business Judgement Rule</i>	44
	1. Pengertian Doktrin <i>Fiduciary Duty</i>	44
	2. <i>Fiduciary Duty</i> Dalam Pengurusan Perseroan	46
	3. Prinsip-prinsip <i>Fiduciary Duty</i> Dalam Pengurusan Perseroan ..	49
	4. Pengaturan <i>Fiduciary Duty</i> Dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas	53
	5. Pengertian <i>Business Judgement Rule</i>	55
	6. Pengaturan <i>Business Judgement Rule</i> Dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas	58
	7. Hubungan Antara <i>Fiduciary Duty</i> Dengan <i>Business Judgement Rule</i>	59
BAB IV	AKIBAT HUKUM TIDAK DILAKSANAKANNYA KEWAJIBAN PEMBERITAHUAN KEPADA MENTERI OLEH DIREKSI BARU ATAS PENGANGKATANNYA	
A.	Akibat Hukum Yang Timbul Karena Tidak Dilakukannya Pemberitahuan Oleh Direksi Baru Kepada Menteri Atas Pengangkatan Dirinya	61
	1. Akibat Hukum Yang Diatur Undang-Undang Perseroan Terbatas	61
	2. Akibat Hukum Bagi Kewenangan Direksi Baru Dalam Mengurus Perseroan	64
	3. Akibat Hukum Dalam Kaitannya Dengan Kepentingan Pemegang Saham	68
	4. Akibat Hukum Dalam Kaitannya Dengan Kepentingan Stakeholder	72
B.	Tanggung Jawab Direksi Baru Atas Tindakan Hukum	

	Dengan Pihak Ketiga	76
C.	Efektifitas Penerapan Pasal 94 ayat (9) Undang-Undang Perseroan Terbatas	79
BAB V	PENUTUP	
A.	Kesimpulan	87
B.	Saran	89
	DAFTAR PUSTAKA	90
	LAMPIRAN (Kuisisioner Berbasis Persepsi)	

